September

Black Out



Hoi!

Edisi Spesial

SCREAMING AT A WORD ZINE

Edisi ini di buat secara khusus oleh screaming at a word sebagai upaya merawat ingatan kawan-kawan tentang peristiwa dan tragedi-tragedi yang terjadi di sepanjang bulan september.

SCREAMING AT A WORD

September menjadi bulan hitam, sebagai penanda maraknya tercatat peristiwa pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya. Serentetan peristiwa tercatat cacat untuk pengungkapan permasalahan yang terjadi tersebut secara gamblang. Sejumlah catatan kelam pun hingga saat ini masih menjadi misteri karena tetap saja tidak menemukan titik terang. Mari merawat ingatan, mari merawat akal sehat, mari mengenang September hitam.

Kontributor

Akulahpeluru, Bejud
Aditya, Endy.

Cover & Layout by Akulahpeluru

PARENTAL ADVISORY
EXPLICIT CONTENT

Pemikiran Kritis Sebagai Kebebasan Mutlak

Oleh: Akulahpeluru

Hidup memang harus terus berjalan namun bukan berarti melupakan masa lalu, gagasan, tragedi dan pelajaran masa silam memang sebuah cetak biru untuk mengetahui dan meneruskan apa yang kita perjuangkan. Tanpa harus memberikan penghormatan yang berlebihan, pentokohan atau pengidolaan pada mereka yang terlibat dalam kejadian-kejadian masa lalu, karena saya yakin kita semua bisa melampaui pemikiran mereka, sedikit naif memang tapi ini sebuah upaya agar pemikiran kita bisa terus berkembang tidak terjebak dalam romantisme masa lalu.

Terlalu banyak nama yang harus di hafal dalam kepala, namun reduksi dari mereka semua yang bisa kita serap hari ini adalah tetang penting nya menjaga pemikiran kritis, karena itu adalah kebabasan terakhir yang di miliki manusia, siapapun tidak akan pernah bisa mehalangi sebuah pemikiran, sekalipun orangnya harus mati pemikiran itu akan mengudara bebas menjadi nafas untuk gelombang selanjutnya, pemikiran ini abadi.

Saya tidak akan membahas bagaimana para pendahulu melawan, atau cara mereka di hilangkan, karena itu mungkin akan di bahas di lembar-lembar zine berikutnya oleh kawan-kawan yang lain, saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap gagasan yang di buat oleh para pendahulu berakar pada satu hal yang sama, yaitu pemikiran kritis, hal yang sebenarnya juga kita miliki.

Saya tidak juga sedang membahas sebuah pemikiran dengan kotak-kotak sekat seperti kiri atau kanan, merah atau hitam atau banyak istilah lain nya, saya membahas sebuah pemikiran yang alamiah, pemikiran yang memang di timbulkan dari keresahan individu terhadap sebuah kondisi tertentu yang tidak di dasari oleh sebuah ideologi. Seorang petani tidak perlu hafal tebal das kapital untuk marah karena sawahnya di gusur akibat investasi, ini sebuah bukti bahwa pemikiran kritis muncul dari setiap kepala, tidak perlu lebel aktivis untuk memperjuangkan hak, tidak perlu lebel revolusioner untuk memiliki gagasan alternatif.

Serupa hari ini, gelombang protes terhadap pemerintah kian hari kian gencar di lakukan oleh banyak kelompok masyarakat yang bukan di dasari oleh ideologi, melainkan karena sebuah kondisi yang memaksa, secara alamiah pemikiran kritis ini muncul, dalam beberapa kasus kita tahu bahwa cara menunjukan ketidak setujuan adalah dengan mobilisasi masa, berorasi, mogok kerja, menduduki titik-titik sentral dan bahkan bentrok fisik, namun dalam keadaan seperti tahun-tahun terakhir ini semua tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan gelombang wabah yang tidak menganjurkan untuk berinteraksi fisik bahkan berdekatan, hal ini menjadi salah satu penyebab meredupnya gelombang perlawanan terhadap

pemerintah, bahkan kerap kali pemerintah memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, karena mereka sadar bahwa meskipun masyarakat memaksa perotes mereka harus berurusan dengan undang-undang karantina, mereka akan mendapatkan sanksi karena melanggar UU tersebut, hal ini aneh menurut saya, jika pemerintah menindak setiap aksi kerumunan dengan dasar UU karantina seharusnya pemerintahan memberlakukan UU karantina total untuk menangani pandemi ini, dengan menjamin segala bentuk kebutuhan masyarakat dan hewan peliharaan nya selama masa karantina berlangsung, karena itu semua jelas tertulis di dalam poin-poin UU karantina. Pemerintah tidak melakukan itu semua karena mereka masih berkutat dengan pemikiran untung-rugi di banding keselamatan rakyatnya, hal ini sebagai salah satu contoh permasalan yang tidak bisa kita protes.

Namun serupa jika aorta tersumbat dan tidak bisa mengalirkan darah ke jantung, maka kapiler-kapiler kecil akan tetap menemukan jalan untuk menuju ke sana, jika kanal-kanal kebebasan publik di tutup maka mereka akan tetap menemukan jalan untuk menuju kebebasan nya, seperti hari ini, masyarakat tetap mampu menemukan jalan untuk kebebasan nya, entah lewat coretan di tembok tembok kota , entah lewat poster-poster protes, entah lewat tulisan, entah lewat memes di sosial media, entah lewat tagar tagar di twitter masyarakat tetap mampu menemukan jalan kebebasan nya. Satu hal menarik dalam aksi protes masyarakat lewat sosial media, sebuah video menujukan beberapa orang menutup telinga mereka di barengi dengan backsound pidato presiden hal yang sangat mengejutkan, menggambarkan ketidak percaya masyarakat terhadap pemerintah, hal ini seharusnya menjadi cambuk keras untuk pemerintah.

Jika kita telisik lebih jauh pemikiran kritis dan budaya protes sudah ada jauh sebelum peradaban modern, dalam sejarah pernah tercatat ada hal serupa di masa kasultan yogyakarta, yaitu Tapa pepe. Tapa pepe sendiri adalah bentuk kearifan lokal warga Yogya, cara rakyat kecil menyampaikan aspirasinya ke yang ada di kerajaan Mataram baik Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta. Tapa pepe dulu dilakukan hingga zaman Sri Sultan Hamengku Buwono VIII atau pertengahan tahun 1900-an. Tapa pepe ini dengan maksud untuk mencari keadilan, mengadu agar mendapat perhatian dari Sultan. Cara tapa pepe dilakukan dengan cara duduk bersila diantara dua buah pohon beringin kembar yang ada di Alun-alun Utara. Mereka menghadap ke selatan atau ke arah Pagelaran dan Siti Hinggil dengan mengenakan pakaian putih. Tapa pepe juga tidak dilakukan setiap hari tapi pada hari tertentu, saat Sultan duduk di singgasana di Siti Hinggil.

Tapi Kita sampai pada titik, tak ada gunanya bergantung pada pemerintah dan negara, Hari ini kita hancur hampir di semua sektor karena berharap kepada mereka, di mulai dari penanganan kesehatan, ekonomi, demokrasi dan bahkan di mata internasional.

Di sektor penanganan kesehatan contohnya mungkin kawan kawan masih ingat banyak pernyataan pemerintah di awal pandemi, yang menganggap

sepele berita penyebaran wabah ini yang membuat kelabakan ketika wabah ini benar-benar menyebar, dari permasalahan kelangkaan masker, hand sanitizer dan di tambahan kelangkaan oksigen dalam tabung karena stok oksigen kita di ekspor ke india dengan alasan persediaan masih banyak, permasalahan jual beli vaksin, alat rapid bekas, korupsi bantuan sosial, tinggi nya jumlah kematian akibat wabah, hal-hal yang merefleksikan kegagalan itu secara nyata.

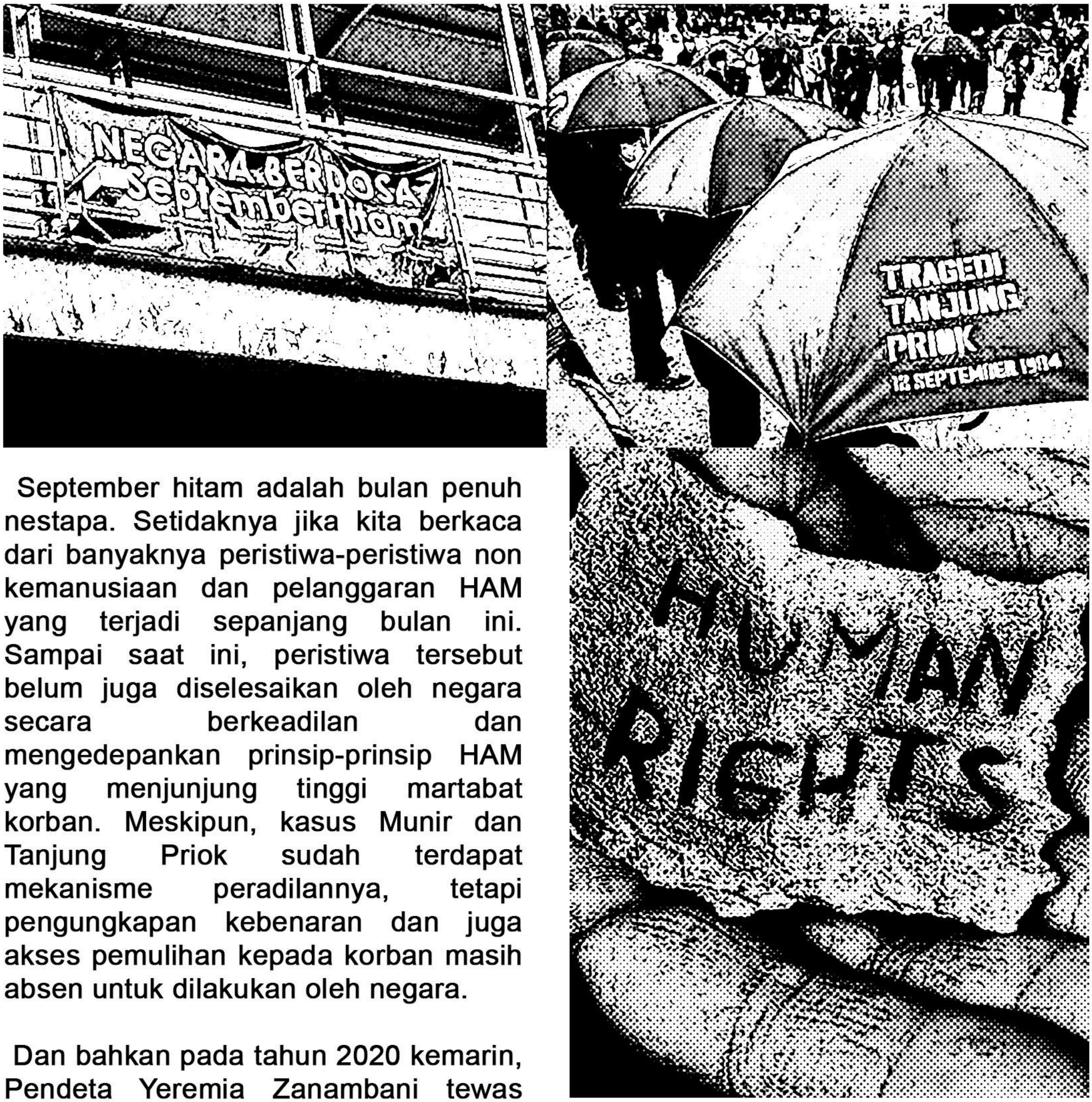
Di sektor ekonomi, dunia hari ini sedang menuju ke arah "Green Economy" yang mulai Bertujuan untuk mendorong kebijakan publik dalam menciptakan sistem perekonomian hijau yang ingin menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, hal ini malah tidak di pahami oleh pemerintah, buktinya pemerintah masih saja sibuk mengekploitasi batubara, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kelapa sawit, penggusuran sawah dan banyak hal destruktif lain nya, hal yang sangat kontradiktif dengan gagasan ekonomi dunia sekarang, dan fakta kemeresotan ekonomi di negara ini adalah, setiap 1 kelahir, bayi tersebut harus menanggung 30jt rupiah hutang negara.

Di sektor demokrasi atau kebebasan sipil kerap kali negara ini self-claming sebagai negara demokrasi, tapi bagaimana bisa negara yang menyebut diri nya negara demokrasi tapi index demokrasi nya rendah, di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU) Dalam laporan nya, negara ini mendapat skor 5,59 untuk kebebasan sipil, Jumlah skor yang diperoleh negara tahun 2020 ini ternyata merupakan perolehan terendah dalam 14 tahun terakhir. Bahkan dalam konteks geopolitik pemerintah negara ini tidak bisa mengambil peran, atau bahkan tidak memiliki peranan, seringkali mangkir dari sidang umum PBB, dan tidak faham dengan isu-isu internasional, contohnya konflik antara dua negara superior di teras negara ini. yaitu Amerika vs China di laut China selatan atau Natuna utara hal ini yang seharusnya menjadi fokus pemerintah karena ini di prediksi lebih dari sekedar konflik perang dagang bahkan bisa menjadi perang terbuka, hal krusial ini yang menjadi alasan Amerika serikat melepaskan imperialisme nya di Afganistan. namun seperti hal nya yang sering terjadi, pemerintah negara ini malah sibuk dengan ketakutan isu-isu receh tentang radikalisme yang di akibatkan dari jatuhnya Afganistan ke tangan taliban, padahal jika pemeritah mengerti keadaan politik global, paradigma tentang terrorisme itu sudah di tinggalkan. Amerika hari ini fokus dengan konflik nya bersama China, dengan terbentuknya AUKUS sebuah aliansi militer yang meliputi Amerika, UK dan Australia di tanggal 15 september 2021 kemarin, yang akan membuat kondisi di medan konflik semakin memanas. tak ada tindakan apapun dari pemerintah, padahal ini akan mengganggu stabilitas kawasan.



Beberapa Kejadian Yang Terjadi Di Bulan September

Oleh: Endy



September hitam adalah bulan penuh nestapa. Setidaknya jika kita berkaca dari banyaknya peristiwa-peristiwa non kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang bulan ini. Sampai saat ini, peristiwa tersebut belum juga diselesaikan oleh negara secara berkeadilan dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM yang menjunjung tinggi martabat korban. Meskipun, kasus Munir dan Tanjung Priok sudah terdapat mekanisme peradilannya, tetapi pengungkapan kebenaran dan juga akses pemulihan kepada korban masih absen untuk dilakukan oleh negara.

Dan bahkan pada tahun 2020 kemarin, Pendeta Yeremia Zanambani tewas ditembak pada Sabtu, 19 September di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kasus penembakan ini diduga dilakukan oleh aparat negara, seorang anggota TNI.
"Ayah kami sebelum meninggal telah mengatakan kepada ibu kami bahwa ia ditembak oleh anggota TNI yang telah lama kami kenal dan dekat dengan kami, pengakuan ayah kami ini benar-benar kami yakini bahwa pelaku pembunuhan ayah kami adalah Anggota TNI," kata Rode melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (10/11/20).

Berikut Sedikitnya tragedi-Tragedi Yang Terjadi Di Bulan Yang Kelam Ini



Pembunuhan Munir Said Thalib - 7 September 2004



Reformasi Dikorupsi - 24 September 2019



Tragedi Tanjung Priok - 12 September 1984



Pembunuhan Salim Kanci - 26 September 2015



Tragedi Semanggi II, 24 September 1999



Tragedi 1965 1966

Eastern Man

Music: Oscar Lolang

Man in the red shirt
Comes from far land in the east
He has the brightest smile
And a saddest stare

He has the bleakest secrets to share
In a way that everyone would care

There goes a song from an Eastern Man
With his Tifa and a mouth like flower
There goes a song comes from deep within
His feeling 'bout his murdered family
By a loyal army

He plays it passionately, with the tune he
borrowed from Marley
He mentions soils of gold
Now shattered by blood

He has the bleakest secrets to share
In a way that everyone would care

There goes a song from an Eastern Man
With his Tifa and a mouth like flower
There goes a song comes from deep within
His feeling 'bout his murdered family
By a loyal army

Sa pu mama mati karena tentara
Sa pu rumah hancur karena tentara
Sa su lama marah deng pemerintah
Dong su buat Papua menjadi merah

There goes a song from an Eastern Man
With his Tifa and a mouth like flower
There goes a song comes from deep within
His feeling

There goes a song from an Eastern Man
With his Tifa and a mouth like flower
There goes a song comes from deep within
His feeling 'bout his murdered family
By a loyal army



Usut Tuntas Kasus Pelanggaran Ham

Oleh: Aditya

Setiap presiden yang menjabat selalu berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negeri ini. Namun, hingga saat ini tidak ada satupun kasus yang teradili secara hakiki. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan, di sana bersemayam kemerdekaan. Para aktivis korban pelanggaran HAM perlu sebuah tindakan nyata dari negara hukum ini, tidak sekedar obral janji tetapi juga supremasi.

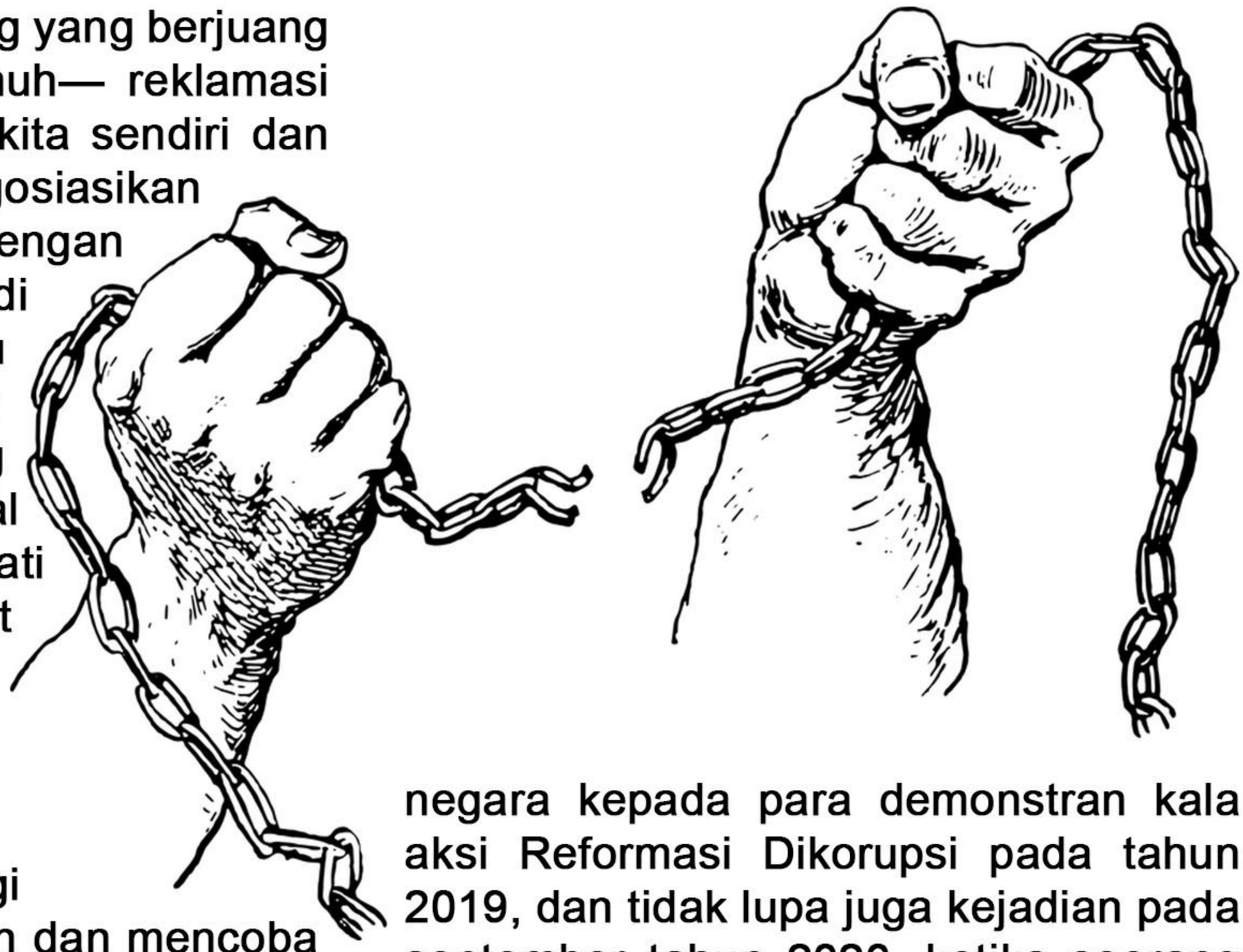
Para korban serta keluarga penghilangan paksa masih menanti keadilan dari pemerintah. Negara sudah seharusnya menjamin penegakkan hak asasi rakyatnya yang dengan lantang menyuarakan kebenaran. Selama rentetan kasus penghilangan paksa belum mendapat tindak lanjut oleh pemerintah, jelas pembungkaman suara rakyat dikatakan masih terjadi.

Oleh karena itu, saya Mochamad Aditya Dwiguna turut serta meminta pemerintah mengusut tuntas segala kasus pelanggaran HAM di negeri ini !



September Hitam: Di Bawah Penindasan Yang Sama.

Oleh: Bejud



Berkali-kali, orang-orang yang berjuang untuk pembebasan penuh— reklamasi kendali atas hidup diri kita sendiri dan kekuatan untuk menegosiasikan hubungan kita sendiri dengan orang-orang dan dunia di sekitar kita—akan selalu dihadapkan dengan struktur kekuasaan yang berkelanjutan yang kebal terhadap seruan hati nurani dan cukup kuat untuk melakukan kekerasan yang terstruktur dan hukuman yang sembarangan yang bagi mereka yang tidak patuh dan mencoba mengusik struktur kekuasaan.

Di negara ini, bulan september menjadi suatu gambaran bagaimana suatu kekuasaan dengan vulgarnya menunjukan suatu kejahatan yang mengerikan. Ingatan yang tak akan lekang dimakan waktu dan suara-suara pekik yang didengungkan kepada negara untuk bertanggunng jawab atas serangkain peristiwa seperti; Pembantaian massal 1965-1966, tragedi Tanjung Priok 1984, lalu bagaimana sepasukan tentara menembaki para demonstran yang menentang UU PKB (tragedi Semanggi II 1999), pembunuhan aktivis HAM (Munir) pada tahun 2004, berlanjut hingga petani asal Lumajang bernama Salim Kancil harus kehilangan nyawa ditangan kroni-kroni tambang pasir ilegal. Lalu tindakan brutal aparatus negara kepada para demonstran kala aksi Reformasi Dikorupsi pada tahun 2019, dan tidak lupa juga kejadian pada september tahun 2020, ketika seorang pendeta Yeremia yang dengan vokal menolak keberadaan militer di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua ditemukan tewas dengan luka tembak dan tusukan.

Teror dan kekerasan yang dilakukan oleh kelas penguasa yang disponsori oleh insturmen-instrumen negara terus melanggengkan kekuasaanya melalui tindakan-tindakan pemaksaan dan kekerasan untuk melanjutkan kepetingan bagi aktor-aktor yang memiliki hak istimewa. Disini salah satu contoh “Hak Istimewa” adalah bagaimana para pelaku pelanggaran HAM mendapat suatu perlindungan oleh negara dengan cara memberi suatu impunitas dengan memanfaatkan mekanisme hukum yang dibuat negara. Impunitas adalah suatu kejahatan—faktanya dari banyak

rangkain kasus pelanggaran HAM, aktor utama tak pernah mendapat suatu jeratan hukum karena impunitas itu tentunya diberikan pemerintah dan penegak hukumnya kepada para aktor yang melakukan pelanggaran HAM tersebut. Tentu saja ini adalah sebuah implikasi kentara bagaimana negara beserta semua institusi didalamnya terlibat dengan kelas penguasa yang personal/politik dalam berbagai macam kasus pelanggaran HAM.

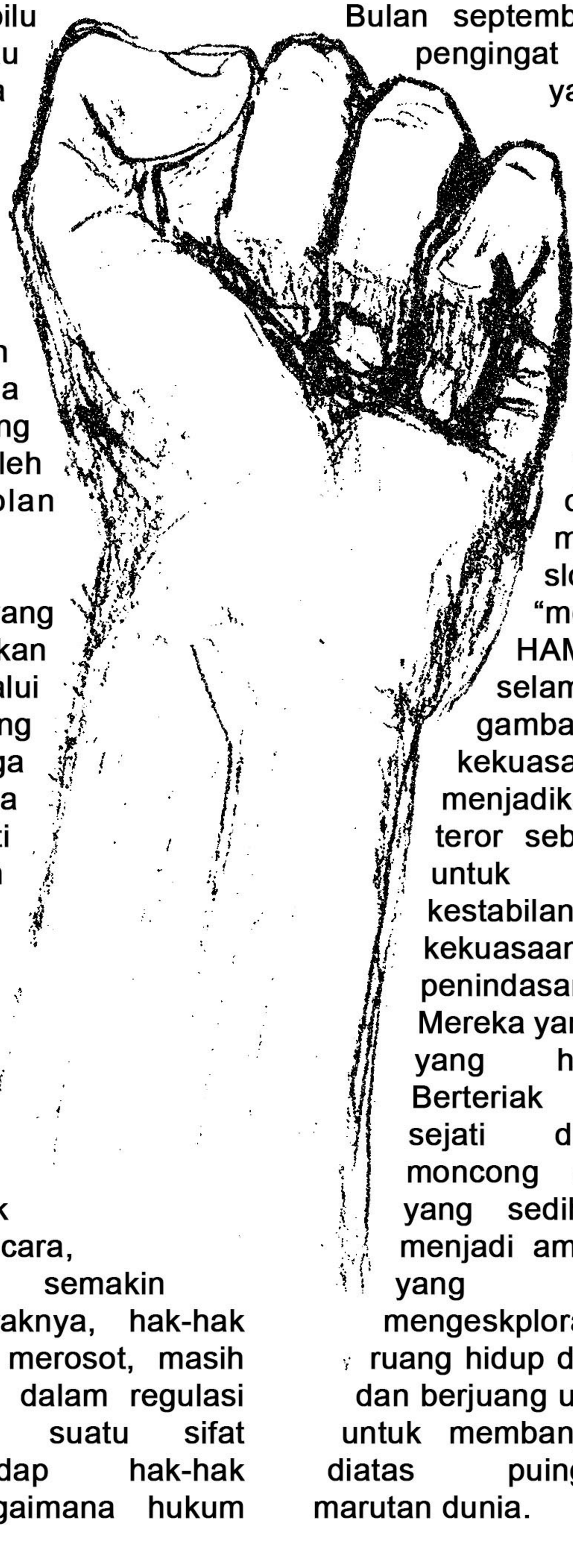
Dari sekian dari banyaknya rentetan daftar kejahatan terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, bulan september menjadi suatu lensa untuk melihat bagaimana kejahatan manusia menjadi suatu kemerosotan yang terus terjadi sepanjang tahunnya. Apabila kilas balik kebelakang—ketika masa rezim soeharto dengan kuasanya yang otoriter, terjadi berbagai pelanggaran HAM. Mulai dari penculikan, pembunuhan, perampasan lahan, lalu bagaimana pembrangusan media informasi, sampai operasi militer yang gencar dilakukan di berbagai daerah seperti, Aceh yang selama era 90an menjadi DOM (Daerah Operasi Militer) dan Tragedi Simpang KKA menjadi suatu memoar yang tak bisa dilupakan warga Aceh saat militer menambaki sipil yang sedang memprotes aksi penganiyaan yang dilakukan oleh militer terhadap beberapa warga.

Pengerahan militer juga sama dilakukan di Papua selama bertahun-tahun dan gejolaknya masih terjadi hingga saat ini. Pelanggaran HAM juga terjadi dalam konflik agraria secara masif di banyak daerah dan ini juga memperlihatkan bagaimana feodal masih tetap eksis dengan para elite oligarki.

Tanah-tanah yang banyak membawa kesejahteraan dan penghidupan bagi rakyat dialih fungsikan atau digusur demi kepentingan-kepentingan para pemodal—dibalik itu ada petani yang resah dan harus menahan pedih karena perlahan tanahnya habis dirampas, lalu masyarakat adat yang harus kehilangan ruang hidupnya karena mesin-mesin industri terus membabad setiap jengkal ruang hidupnya. Dan mereka yang terus berjuang melawan dominasi untuk mempertahankan sumber kehidupannya tersebut harus berhadapan dengan berbagai macam bahaya yang selalu mengintai bagi dirinya, dan terkadang harus berdarah-darah hingga menimbulkan korban jiwa, semua itu demi kejayaan korporasi. Pemerintah tentu saja bergandengan dengan tangan dengan mereka para perut-perut yang rakus.

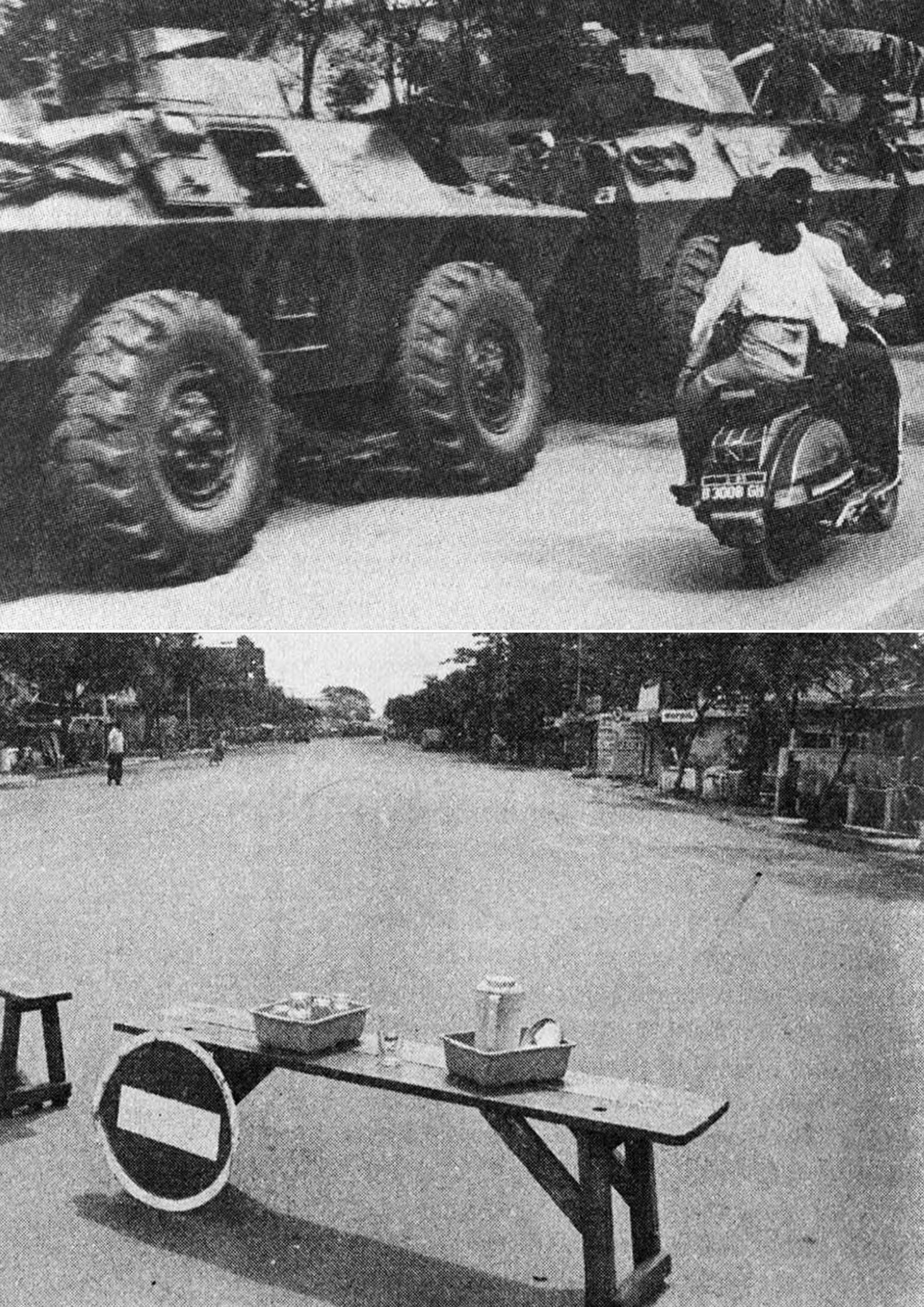
Suatu tindakan represif terhadap juga dilakukan oleh ormas reaksioner yang bergerak secara sistematis menyebarkan rasa takut sebagai senjata utama pada prakteknya,

mereka lebih banyak menjadi suatu alat penguasa untuk memuluskan segala agenda-agenda yang secara terbuka menyerang kehidupan. Kita masih ingat bagaimana mereka dan aparatus negara, membubarkan aksi kamisan sebagai pengingat pilu pelanggaran HAM, atau bagaimana pengepungan asrama Papua di Surabaya dan Yogyakarta yang diiringi umpatan rasial kepada mahasiswa Papua, semua itu merupakan representasi bagaimana represi fasistik yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan ormas reaksioner.



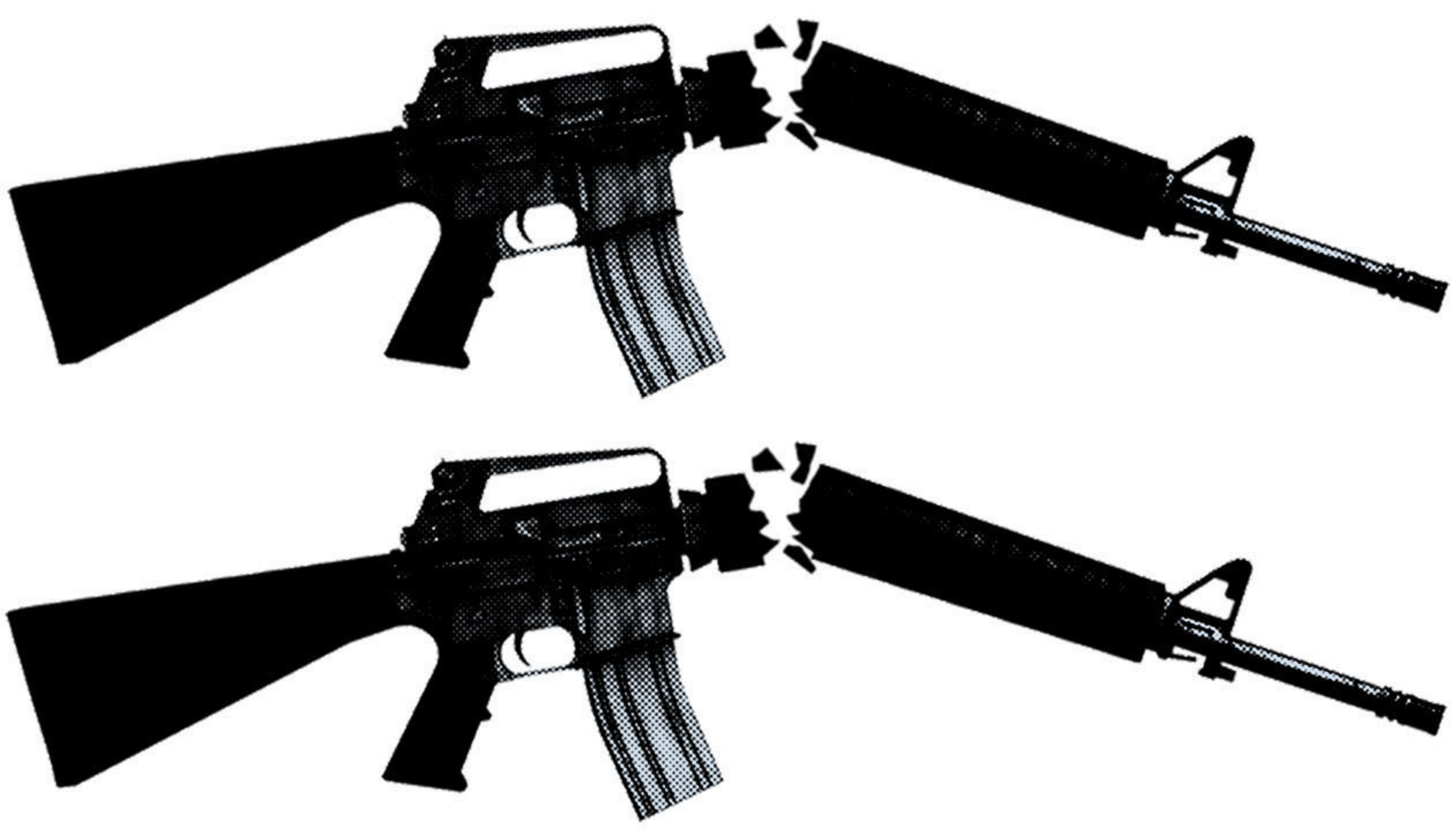
Hak-hak individu yang terus diinjak dan bukan hanya dilakukan melalui tindakan-tindakan yang bersifat verbal, tapi juga melalui terjadi pada medium lain, seperti kebijakan-kebijakan dalam bermacam-macam bentuk yang membuat rakyat menjadi terkungkung bersama hak-hak individunya, seperti beberapa hal; kebebasan untuk berkumpul, berbicara, berekspresi yang semakin diperkecil ruang geraknya, hak-hak buruh yang semakin merosot, masih dipeliharanya patriarki dalam regulasi yang mempraktikan suatu sifat diskriminatif terhadap hak-hak perempuan, lalu bagaimana hukum yang sembarangan pada orang-orang yang tidak bersalah atau pada mereka yang mencoba membuka kedok kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, mereka akan pergi ke dinding penjara.

Bulan september menjadi sebuah pengingat tentang apa saja yang terjadi secara simultan dan sebuah refleksi atas apa yang saat ini masih terjadi saat ini; penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, kriminalisasi hingga mereka yang harus "hilang" diatas tipu daya negara yang masih berkoar tentang slogan semu "menjunjung tinggi nilai HAM". Apa yang terjadi selama ini adalah sebuah gambaran tentang kekuasaan yang akan tetap menjadikan kekerasan dan teror sebagai bentuk mutlak untuk mempertahankan kestabilan hegomoni kekuasaan mereka. Dibawah penindasan yang sama. Mereka yang hilang dan mereka yang harus kehilangan. Berteriak untuk kebebasan sejati dibawah ancaman moncong senapan. Jiwa-jiwa yang sedih terpacu untuk menjadi amarah dan semangat yang tinggi. Terus mengeskplorasi setiap celah ruang hidup dari sepercik harapan dan berjuang untuk bertahan hidup, untuk membangun kembali surga diatas puing-puing kecarumat marutan dunia.





History is not hatred !



SCREAMING AT A WORD
AGAINST OTORITARIANISME